

IMPLEMENTASI PROGRAM KEBUN BIBIT RAKYAT (KBR)

Elva Hafsah dan Meyzi Heriyanto

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Implementation People Nursery Program (KBR). This study describes the implementation of the People Nursery Program (KBR) in Pelalawan in 2010. The research method used in this paper is a descriptive qualitative research methods. What research is Pelalawan and author of the study collected data from multiple sources of books, encyclopedias, journals and in-depth interviews with informants technical research that Forest Service officials and members Pelalawan Farmers who follow KBR Pelalawan district. This study concluded that the implementation of the program has been implemented KBR but not managed optimally. Factors affecting the implementation of the program cost limitations KBR was clearing land, long period of time in the harvest and sale of timber seedlings or trees that have to use Origin Certificate (SKAU) Wood.

Abstrak: Implementasi Program Kebun Bibit Rakyat (KBR). Penelitian ini menggambarkan mengenai implementasi Program Kebun Bibit Rakyat (KBR) di Kabupaten Pelalawan tahun 2010. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Pelalawan dan penulis mengumpulkan data penelitian dari beberapa sumber buku, ensiklopedia, jurnal dan wawancara mendalam dengan informan penelitian yaitu petugas teknis Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan dan Anggota Kelompok Tani yang mengikuti KBR di Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Program KBR sudah terlaksana namun belum berhasil secara optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program KBR adalah keterbatasan biaya pembersihan lokasi lahan, jangka waktu yang panjang dalam panen bibit dan juga penjualan kayu atau pohon yang harus menggunakan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Kayu.

Kata Kunci: Implementasi, kebijakan, peraturan, dan Kebun Bibit Rakyat (KBR).

PENDAHULUAN

Banyak wilayah hutan di Indonesia khususnya yang berada di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) berada pada kondisi yang kritis. Diperlukan upaya yang maksimal untuk mempertahankan lahan kritis, lahan kosong di dalam dan di luar kawasan hutan dengan jenis tanaman hutan dan jenis tanaman serbaguna. Selain itu keinginan masyarakat untuk menanam tanaman hutan dan jenis tanaman serbaguna dalam berbagai upaya rehabilitasi hutan dan lahan selalu dibatasi oleh kemampuan masyarakat untuk memperoleh bibit yang baik dan unggul.

Masyarakat cenderung menanam tanaman hutan dan jenis tanaman serbaguna dari biji atau benih asalan yang tidak jelas asal usulnya, sehingga mengakibatkan tanaman tersebut memerlukan waktu lebih panjang untuk berproduksi. Apabila tanaman tersebut berproduksi, maka akan menghasilkan kualitas dan kuantitas yang

hasilnya tidak memuaskan. Hal inilah yang terjadi juga di wilayah Kabupaten Pelalawan.

Banyak masyarakat di Kabupaten Pelalawan lebih memilih untuk menanam secara homogen, yaitu penanaman tanaman sawit secara bersama-sama dan besar-besaran. Hal itu mengakibatkan terjadinya degradasi hutan dan eksploitasi lahan hutan secara berlebihan. Selain itu, banyak masyarakat yang telah melakukan penanaman terhadap kawasan hutan dan lahan berupa pohon Jati Ambon atau Klamayan, namun hasil yang diperoleh tidak mencapai hasil maksimal.

Bertolak dari latar belakang permasalahan tersebut, maka pemerintah mencanangkan kegiatan yang berbasis pada pemberdayaan rakyat dengan menyediakan bibit tanaman yang baik. Program tersebut dikenal dengan program Kebun Bibit Rakyat (KBR) yang merupakan fasilitas pemerintah dalam penyediaan bibit

tanaman hutan dan jenis tanaman serba guna (MPTS) yang prosesnya dibuat secara swakelola oleh kelompok tani. Hasil bibit dari Kebun bibit rakyat merupakan penanaman dilahan kritis atau lahan kosong dan lahan tidak produktif dalam pemulihan kondisi DAS yang kritis.

Beragam batasan mengenai kebijakan publik diberikan oleh para ahli. Meskipun tidak menyebutkan secara spesifik siapa pelakunya, kebijakan publik sering diberi batasan sebagai hasil-hasil keputusan (*decision*) yang diambil oleh pelaku-pelaku tertentu untuk tujuan-tujuan publik. Menurut Nugroho (2003), bukan berarti kebijakan publik mudah dibuat, mudah dilaksanakan, dan mudah dikendalikan, karena kebijakan publik menyangkut politik. Kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan pemerintahan pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip. *Pertama*, dalam konteks bagaimana merumuskan kebijakan publik (formulasi kebijakan). *Kedua*, bagaimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan. *Ketiga*, bagaimana kebijakan publik tersebut dievaluasi. Dalam konteks formulasi, maka berbagai isu yang banyak beredar didalam masyarakat tidak semua dapat masuk agenda pemerintah untuk diproses menjadi kebijakan (Wibowo, 2005).

Dalam rangkaian proses kebijakan publik, terdapat beberapa tahapan yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Perumusan atau formulasi kebijakan merupakan inti dari kebijakan publik yaitu proses memastikan pokok isu dari permasalahan yang sedang dihadapi dengan memperhatikan bahwa rumusan kebijakan akan menjadi hukum bagi elemen negara.

Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan (implementasi) kebijakan adalah cara yang dipilih oleh sebuah kebijakan dalam mencapai tujuannya. Pada berikutnya, dilakukan evaluasi kebijakan yang tidak semata-mata melihat kesenjangan antara tujuan dan pencapaiannya, namun melingkupi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam perumusan, implementasi dan lingkungan kebijakan. Untuk mengkaji implementasi kebijakan, menurut Syukur (1986) ada tiga unsur penting dalam proses implementasi: 1) Adanya program atau kegiatan yang akan dilaksanakan,

2) Target group; dan 3) Unsur pelaksana. Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksanaan/ penerapan kebijakan dengan desain, tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri serta memberikan dampak/hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi.

Implementasi sebuah kebijakan pemerintah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Edwards III (1984), terdapat empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemerintah. *Pertama*, komunikasi. Implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.

Kedua, sumber daya. Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi kebijakan program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Ketiga, disposisi atau sikap. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Keempat, struktur birokrasi. Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

Secara khusus penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Kebun Bibit Rakyat (KBR) di Kabupaten Pelalawan tahun 2010.

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang diawali dengan menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi berkaitan implementasi Program KBR di Kabupaten Pelalawan tahun 2010. Setelah itu akan dilanjutkan dengan menganalisa mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program KBR. Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara bersama informan penelitian. Pada metode ini, data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas merupakan data-data sekunder yang didapatkan dari buku-buku, majalah-majalah, jurnl, surat kabar, buletin, laporan tahunan dan sumber-sumber lainnya. Peneliti juga menggunakan sarana internet dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang akan dibahas.

Dalam rangka memberikan fokus yang lebih tajam terhadap permasalahan yang dibahas, maka peneliti merasa perlu untuk memberikan batasan waktu dalam penelitian ini. Adapun rentang waktu yang akan peneliti maksud adalah antara tahun 2010-2011 pada awal mula implementasi Program KBR di Kabupaten Pelalawan. Tahun 2010 dipilih karena pada saat itu merupakan awal implementasi Program KBR. Namun

begitu batasan tahun pada penelitian ini bukan merupakan suatu hal yang mutlak, tahun-tahun sebelum dan sesudahnya juga akan menjadi bagian dari kajian penelitian ini.

Sebagai kerangka acuan untuk menjawab permasalahan penelitian, maka peneliti menggunakan teori kebijakan. Pengertian kebijakan publik harus diawali dengan pemahaman terhadap pengertian dari kebijakan. Kerangka teori dibutuhkan untuk peneliti untuk menelaah permasalahan penelitian dengan lebih terperinci. Selain itu kerangka teori juga berguna bagi peneliti untuk menyimpulkan hasil penelitian dan menemukan hipotesis penelitian ini. Kerangka teori yang digunakan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini adalah teori kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan pedoman penyelenggaraan KBR diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.24/Menhut-II/2010 mengenai Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat. Peraturan merupakan landasan atau acuan bagaimana penyelenggaraan KBR sampai langsung kekelompok tani di daerah tingkat kabupaten/kota. Pada penyelenggaraannya ditentukan oleh beberapa kriteria desa sebagai lokasi kebun adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan diutamakan berada dalam DAS secara prioritas dengan jenis tanaman pohon jati ambon dan klampayan.
2. Penyelenggaraan diutamakan berada dalam dan sekitar kawasan hutan.
3. Penyelenggaraan diutamakan berada di lahan kosong atau tidak produktif serta mata pencaharian pada sektor pertanian dapat lebih ditingkatkan.

Tata cara seleksi lokasi adalah usulan calon lokasi KBR dari Kepala Desa/atau langsung dari kelompok tani kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota. Kemudian Kepala Dinas menetapkan lokasi KBR setelah mendapat penilaian dari UPT Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS). Penetapan akhir lokasi akan disampaikan Kepala Dinas Kehutanan kepada UPT Dirjen RLPS.

Pelaksanaan dengan memperhatikan beberapa persyaratan calon kelompok tani dan desa calon KBR di Kabupaten Pelalawan, yaitu sebagai berikut:

1. Beranggotakan minimal 15 orang baik laki-laki maupun perempuan yang berdomisili di desa setempat.
2. Terdapat areal hutan/lahan untuk lokasi penanaman bibit kebun bibit rakyat ekuivalen seluas 25 -100 ha untuk jenis non mangrove dan seluas 10-20 ha untuk jenis mangrove.
3. Berada pada sasaran Rehabilitasi hutan dan lahan berdasarkan Rencana teknik rehabilitasi hutan dan lahan daerah aliran sungai.
4. Pada setiap desa calon lokasi kebun bibit rakyat, ditetapkan 1 kelompok masyarakat penerima dana KBR dengan prioritas pada desa yang belum pernah mendapat kegiatan KBR.

Sasaran pengguna bibit Program KBR untuk penanaman kegiatan hutan rakyat, penghijauan lingkungan pada fasilitas umum,/fasilitas sosial ruang terbuka hijau, turus jalan, kanan kiri sungai, halaman sekolah, pasar, dan lain-lain. Rehabilitasi mangrove dan penanaman di kawasan hutan yang telah diarahkan sebagai areal kerja hutan kemasyarakatan atau yang telah memiliki izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan dan hak pengelolaan hutan desa.

Penetapan Program KBR oleh Kepala Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai didasarkan pada hasil verifikasi administrasi dan teknis yang

memenuhi persyaratan. Lokasi dan kelompok masyarakat Program KBR di Kabupaten Pelalawan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai dan disampaikan pada pihak terkait.

Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, maka jumlah bibit yang disediakan bagi setiap kelompok masyarakat untuk Pulau Jawa berjumlah 40.000 batang per unit dan di luar Pulau Jawa 25.000 batang per unit KBR. Proses pembuatan bibit kebun bibit rakyat di Kabupaten Pelalawan dilaksanakan dengan penyediaan bibit atau benih bahan tanaman yang berupa kayu-kayuan dan tanaman serba guna termasuk jenis tanaman mangrove dan hutan pantai. Selanjutnya penyiapan media tabur dan media saph juga sangat berfungsi bagi Kabupaten Pelalawan.

Pada tahap pelaksanaan kebijakan, kelompok tani akan menyusun Rencana Usulan Kegiatan Kelompok dimana paling sedikit memuat Nama Kelompok, Daftar Anggota dan pengurus Kelompok, sasaran lokasi kegiatan, komponen kegiatan seperti uraian kegiatan, volume, jenis dan jumlah bibit, biaya, tata waktu dan penanggung jawab serta pemanfaatan dan distribusi bibit.

Penyaluran Dana dilakukan dengan pola transfer uang kepada kelompok pengelola KBR. Pencairan dilakukan dua tahap, tahap pertama sebesar 60% untuk digunakan sebagai dana awal bagi kelompok tani dalam menanam tana-

Tabel 1. Rekapitulasi Penanaman Kebun Bibit Rakyat (KBR) Tahun 2010

No	Kelompok Pegelola/KBR	Jumlah yang Ditanam	Jumlah yang Hidup (%)	Jumlah yang Diambil Masyarakat
1	Kel. Tani Suka Maju	50.000	28.811 (68%)	11.189
2	Kel. Tani Sepakat	50.000	28.213 (68%)	7.787
3	Kel. Tani Rimbo Kampar	50.000	31.393 (76%)	12.607
4	Kel. Tani Cahaya Baru	50.000	39.940 (85%)	9.060
5	Kel. Tani Harapan Baru	50.000	40.293 (87%)	6.707
6	Kel. Tani Rangsang Mandiri	50.000	32.531 (77%)	13.469
7	Kel. Tani. Meranti Indah	50.000	32.321 (77%)	12.679
8	Kel. Tani Ma'cik Manja	50.000	38.996 (83%)	8.004
9	Kel. Tani Sialang Jaya	50.000	40.815 (87%)	7.185
10	Kel. Tani Wono Makmur	50.000	32.863 (77%)	13.137

Sumber: Data Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Tahun 2010

man yang dijadikan sebagai lahan kebun. Setelah itu jumlah dana 40% akan diberikan kepada masyarakat setelah dilakukan penilaian pekerjaan oleh pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan terhadap hasil pekerjaan penanaman bibit pada tahap 1.

Pelaporan kemajuan KBR ini dilakukan oleh masing-masing kelompok tani dalam bulanan, triwulan dan tahunan. Laporan ini disampaikan kelompok pengelola KBR kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota dan Kepala Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai dan Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai yang nantinya akan disampaikan kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS).

Implementasi kebijakan Program KBR di Kabupaten Pelalawan dilaksanakan di beberapa desa yang ada di Kecamatan wilayah Kabupaten Pelalawan. Terdapat beberapa KBR di Kabupaten Pelalawan seperti KBR Dejabon di Desa Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci dan KBR Ma'cik Manja di Kelurahan Pangkalan Bunut, Kecamatan Bunut terlihat dua-duanya membibitkan pohon jabon.

Tanaman jati ambon atau di Riau dikenal dengan nama klampayan dan bongkal gajah sebenarnya bukan jenis pohon baru. Pohon ini banyak ditemui di Riau khususnya di tepian sungai. Namun, namanya baru beberapa tahun belakangan ini melambung, khususnya di Pulau Jawa seiring dengan menipisnya pohon alam untuk memenuhi kebutuhan meubel dan plywood. Pohon ini banyak dikembangkan sebagai hutan tanaman rakyat dan sudah bisa dipanen dalam waktu umur lima tahun.

Kegiatan KBR ini sendiri adalah untuk memfasilitasi kelompok masyarakat atau petani yang ingin mengembangkan pembibitan, terutama di wilayah desanya. Kelompok pembibitan tersebut dapat memilih tanaman apa saja yang cocok (secara teknis) dan sangat diminati oleh masyarakat. Pembangunan KBR mulai dilaksanakan tahun 2010, dan sampai sekarang kegiatan tersebut masih berlanjut dilakukan dengan volume yang makin bertambah.

Bibit yang sudah layak untuk ditanam akan disalurkan dan ditanam pada lahan lahan yang

kondisinya cukup kritis, ditanam dengan menggunakan sistem pengkayaan atau sistem reboisasi. Pada kondisi ini masyarakat menanam bibit tersebut dengan sistem pengkayaan. Bibit yang ditanam pada lahan masyarakat sebaiknya dirawat sampai tanaman tersebut cukup kuat terhadap toleransi lingkungan baru, mengingat bahwa keberadaan tanaman benar benar sangat bermanfaat terhadap lingkungan kita.

Program KBR merupakan bagian dari program menanam satu miliar pohon atau yang dikenal juga dengan *One Billion Indonesian Trees for The World* (OBIT). Program KBR dilandaskan pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.24/Menhut-II/2010. Namun sampai saat ini implementasi atau pelaksanaan Program KBR di Kabupaten Pelalawan belum mencapai hasil yang maksimal.

Pencapaian hasil yang kurang maksimal dalam Program KBR adalah keengganan kelompok tani untuk melakukan penanaman terhadap bibit yang akan dijadikan sebagai komoditas KBR. Seperti kelompok tani suka maju yang hanya menanam bibit dalam jumlah yang kecil dan tidak memeliharanya dengan baik. Selain itu biaya yang besar dan waktu panen yang cukup lama juga menjadi penghambat bagi kelompok tani untuk melakukan dan mengikuti Program KBR.

Kurang berhasilnya Program KBR di Kabupaten Pelalawan tentu saja dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari segi ketepatan pelaksanaan teknis kebijakan itu sendiri ataupun kurangnya sosialisasi dan pendidikan serta pengetahuan dalam mendukung program pemerintah, khususnya Program KBR di Kabupaten Pelalawan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program KBR di Kabupaten Pelalawan tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi

Bentuk nyata komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai bersama Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam melaksanakan Program KBR di Kabupaten Pelalawan adalah melalui sosialisasi kepada kelompok tani untuk mengantisipasi

terjadinya kerusakan ekosistem alam. Akan tetapi, komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan kepada kelompok tani dilakukan melalui sosialisasi kegiatan Program KBR secara teknis kepada ketua kelompok tani. Hanya beberapa orang ketua kelompok tani yang mengerti Program KBR. Anggota dan masyarakat lainnya tidak mengerti secara langsung. Hal ini mengakibatkan salah pemahaman komunikasi diantara pemerintah dan kelompok tani atau masyarakat dalam melaksanakan kegiatan Program KBR secara optimal.

2. Sumber Daya

Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program.

Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai teknik-teknik kelistrikan.

Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepetuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan di lapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana.

Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggung jawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien.

Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.

Sumber daya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

Sumber daya manusia yang menjadi tujuan dan sasaran dari Program KBR di Kabupaten Pelalawan adalah masyarakat atau kelompok tani Kabupaten Pelalawan. Kelompok tani telah melaksanakan Program KBR sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini. Hal ini menjadikan berbagai lahan yang ada di Kabupaten Pelalawan dijadikan sebagai Program KBR.

3. Disposisi/Sikap

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

Program KBR merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjaga kemanfaatan dari pohon/tumbuhan disekitar kita. Salah satu wilayah yang melaksanakan Program KBR adalah Kabupaten Pelalawan yang secara potensi memiliki sumber daya alam di bidang kehutanan. Program KBR di Kabupaten Pelalawan telah dilaksanakan sejak tahun 2010. Namun Biaya pembersihan lokasi atau lahan yang akan dijadikan sebagai kebun untuk dijadikan bibit

tanaman yang berasal dari Program KBR cukup mahal.

Biaya pembersihan lokasi atau lahan yang akan dijadikan sebagai lahan Program KBR di Kabupaten Pelalawan tidak mendapat bantuan dari pemerintah dan kelompok tani hanya mendapatkan biaya penanaman bibit sebanyak Rp.1000, per batangnya.

Implementasi Program KBR di Kabupaten Pelalawan dilakukan di tiap unit pada tiap desa kelompok penerima. Tiap unit minimal memproduksi 50.000 bibit tanaman. Persyaratan teknis seperti kondisi lahan menjadi prioritas utama. Lahan kritis dan rawan bencana lebih diutamakan sebagai lahan prioritas. Setelah itu, bibit yang sudah layak untuk ditanam akan disalurkan dan ditanam pada lahan lahan yang kondisinya cukup kritis, ditanam dengan menggunakan system pengkayaan atau system reboisasi. Pada kondisi ini rerata masyarakat menanam bibit tersebut dengan system pengkayaan. Bibit yang ditanam pada lahan masyarakat sebaiknya dirawat sampai tanaman tersebut cukup kuat terhadap toleransi lingkungan baru, mengingat bahwa keberadaan tanaman benar-benar sangat bermanfaat terhadap lingkungan.

Selain tidak adanya biaya pembersihan lokasi atau lahan yang akan dijadikan sebagai Program KBR, maka faktor lainnya yang mempengaruhi implementasi dan keberhasilan Program KBR di Kabupaten Pelalawan adalah jangka waktu panen dari kebun bibit rakyat yang cukup panjang.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi Pemerintah di Indonesia terutama di Kabupaten Pelalawan juga semakin mengakibatkan terhambatnya implementasi Program Kebun Bibit Rakyat di Kabupaten Pelalawan. Selain itu, struktur birokrasi yang cukup rumit seperti penjualan kayu atau pohon yang harus menggunakan Surat Keterangan Hasil Usaha (SKHU) dan juga pembiayaan pembersihan lahan yang tidak ada dari masyarakat semakin menghambat implementasi Program KBR di Kabupaten Pelalawan.

Selain faktor jangka waktu panen yang cukup lama, maka setelah Program KBR di Kabupaten Pelalawan telah berhasil panen untuk menjual kayu hasil dari Program KBR juga harus menggunakan SKHU. Hal ini juga menjadi faktor penghambat bagi kelompok tani untuk melaksanakan Program KBR di Kabupaten Pelalawan.

Beberapa jenis tanaman yang bisanya dikembangkan oleh kelompok pembibitan, yaitu tanaman dari jenis *Multi Purposes Trees Species* (MPTS) dan Kekayuan. MPTS adalah tanaman yang memiliki fungsi selain kayu, misalnya dapat dimanfaatkan buah atau bagian tanaman lainnya. Sedangkan tanaman kekayuan merupakan tanaman yang khusus dimanfaatkan kayunya saja. Tanaman jenis MPTS lebih cenderung memiliki sifat konservatif, karena tanaman tersebut jarang ditebang oleh masyarakat.

Meskipun demikian tetap saja perbandingan tanaman kayu lebih banyak dibandingkan dengan tanaman MPTS. Contoh tanaman MPTS seperti Aren (*Arenga saccharifera*) dan Picung (*Pangium edule* REINW) (buahnya untuk bumbu masak). Sedangkan kekayuan contohnya seperti Sengon (*Albasia falcataria*) dan Jati (*Tectona grandis*).

SIMPULAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program KBR di Kabupaten Pelalawan adalah: *Pertama*, tidak adanya bantuan biaya atau dana dari pemerintah untuk melakukan pembersihan lokasi atau lahan yang akan dijadikan sebagai lahan. Kelompok tani harus mengeluarkan tenaga dan biaya lagi untuk melakukan pembersihan lokasi atau lahan, sedangkan yang ada hanya biaya penanaman bibit yang dihitung setiap bibit Rp.1000 per batang. *Kedua*, jangka waktu panen yang panjang dari penanaman bibit. Waktu yang dibutuhkan oleh kelompok tani dalam menanam, memelihara sampai pada waktu masa panen cukup lama dan hasil panen tersebut hanya sekali habis. Hal ini mengakibatkan keengganan para kelompok tani untuk melakukan penanaman bibit. *Ketiga*, setelah

menjadi kebun atau setelah berhasil dipanen, maka pohon atau kayu yang akan dijual harus menggunakan SKAU Kayu.

DAFTAR RUJUKAN

Abdullah M. Syukur, 1986, *Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi Kebijakan*, Jakarta: P4N.
Bambang Sunggono, 1994, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.
Eddy Wibowo, 2005, *Seni Membangun Kepemimpinan Publik*, Yogyakarta: BPFE.
Edward III, George C, 1984. *Public Policy Implementing*, London: Jai Press Inc.

Harold D. Laswell, 1971, *A Preview of Policy Sciences*, New York: American Elsevier.
Rian Nugroho, 2003, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: Elekmedia Komputindo.
S.A Wahab, 1997, *Analisa Kebijakan Negara dari Formulasi ke Impelentasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
Samodra Wibawa, 1994, *Kebijakan Publik: Proses dan Analisis*, Jakarta: Intermedia.
Thomas R. Dye, 1978, *Understanding Public Policy*, Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs, NJ.